



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
PADANG

JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175
TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.padang@kkp.go.id

Nomor : B.995/BPSPL.1/TU.210/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja
BPSPL Padang Triwulan II Tahun 2025

18 Juli 2025

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
di Jakarta Pusat

Dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang periode Triwulan II Tahun 2025 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hendrisman

Tembusan:
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA

Triwulan II

TAHUN 2025



KKP
2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi mengenai capaian kinerja BPSPL Padang hingga Juni 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dengan hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja BPSPL Padang kepada para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama triwulan II 2025.

Di samping itu, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Kritik, masukan, dan saran sangat kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan laporan ini. Atas perhatian dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, 18 Juli 2025
Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hendrisman, S.St.

Ringkasan Eksekutif

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Triwulan II 2025 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai upaya dalam mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, BPSPL Padang menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Padang berpedoman pada sasaran strategis yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran 2025. Pada tahun 2025, terdapat sembilan sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPSPL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Lebih lanjut, dilakukan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulannya untuk memperoleh gambaran konkret terkait aspek ketercapaian kinerja secara kuantitatif. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang periode triwulan II 2025 adalah **111,61 (kategori istimewa)**. Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPSPL Padang triwulan II 2025:

1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 3 Provinsi belum diukur capaiannya karena memiliki periode pengukuran tahunan.
2. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 25 Orang belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
3. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 1 Kesepakatan belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 5 Jenis belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 5 Jenis belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
6. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan dengan target tahunan 80 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
7. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 1 Dokumen belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan
8. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 2 Dokumen belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.

9. Nilai PM SAKIP BPSPL Padang dengan target tahunan 88 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang dengan target triwulan II 85 telah tercapai 98,08 dengan persentase capaian 115,39%.
11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang dengan target tahunan 71,5 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 4 Dokumen telah tercapai sesuai target 2 Dokumen pada Triwulan II 2025.
13. Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang dengan target triwulan II 78 telah tercapai 88,51 dengan persentase capaian 113,47%.
14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang dengan target 95% telah mencapai 100% pada triwulan II 2025.
15. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 100 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang dengan target tahunan 85 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Padang dengan target tahunan 80 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang dengan target 6% telah tercapai 100% pada triwulan II 2025.
19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang dengan target tahunan 91 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja yang dijadwalkan pada triwulan II 2025 dengan persentase $\geq 100\%$. Pencapaian tersebut juga didukung dengan adanya alokasi **pagu anggaran sejumlah Rp17.679.108.000,00** (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 73,84% bersumber dari Rupiah Murni sementara 26,16% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Hingga triwulan II 2025, terdapat blokir terhadap anggaran tersebut sejumlah Rp 2.943.924.000 (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Blokir tersebut merupakan blokir efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Kode Blokir A). Pada triwulan II 2025, realisasi anggaran mencapai Rp6.439.681.665 (Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan persentase 36,43%. Adapun efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target tersebut belum menunjukkan nilai akhir karena periode pengukurannya yang berlangsung tahunan.

Adapun rekomendasi untuk pencapaian kinerja periode selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang anggaran pendukungnya sudah tidak terdampak blokir. Adapun upaya tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya telah diwujudkan melalui pemantauan kinerja anggaran secara berkala dan mensosialisasikan pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP kepada seluruh pegawai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel.....	x
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	1
1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis.....	4
1.4 Sistematika Penyajian Laporan	8
II. Perencanaan Kinerja	9
2.1. Rencana Strategis DJPK 2025 s.d. 2029.....	9
2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	9
2.3. Postur Anggaran 2025	12
III. Akuntabilitas Kinerja.....	15
3.1. Capaian Kinerja	15
IKU. 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Provinsi).....	16
A. Capaian Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	16
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	16
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan target Tahunan	16
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	16
E. Kegiatan Pendukung.....	16
IKU. 2. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang).....	17
A. Capaian Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi	17
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	17
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	17
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	17
E. Kegiatan Pendukung.....	17
IKU. 3. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	18
A. Capaian Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi	18
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	18
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	18

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	18
E. Kegiatan Pendukung.....	18
IKU. 4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis).....	19
A. Capaian Jenis Ikan Dilindungi yang Dilakukan Upaya Pengelolaannya.....	20
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025.....	20
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan.....	20
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	20
E. Kegiatan Pendukung.....	20
IKU. 5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis).....	23
A. Capaian Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan.....	23
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025.....	23
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan.....	23
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	23
E. Kegiatan Pendukung.....	23
IKU. 6. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai).....	27
A. Capaian Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan.....	27
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025.....	27
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan.....	28
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	28
E. Kegiatan Pendukung.....	28
IKU. 7. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen).....	30
A. Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun.....	30
B. Perbandingan Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025.....	31
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan.....	31
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	31
E. Kegiatan Pendukung.....	31
IKU. 8. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen).....	31
A. Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut.....	31
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025.....	32
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan.....	32

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	32
E. Kegiatan Pendukung.....	32
IKM. 9. Nilai PM SAKIP BPSPL Padang (Nilai).....	35
A. Capaian Nilai PM SAKIP BPSPL Padang	35
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	35
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	35
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	35
E. Kegiatan Pendukung.....	35
IKM. 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA BPSPL Padang (Nilai).....	36
A. Capaian Nilai IKPA BPSPL Padang	36
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	37
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	37
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	37
E. Kegiatan Pendukung.....	37
IKM. 11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)	37
A. Capaian NKPA BPSPL Padang.....	38
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	38
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	38
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	38
E. Kegiatan Pendukung.....	38
IKM. 12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen).....	38
A. Capaian Laporan SPIP yang Disusun	38
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	39
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	39
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	39
E. Kegiatan Pendukung.....	39
IKM. 13. Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks).....	39
A. Capaian IP ASN BPSPL Padang.....	40
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	40
C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	40
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	40
E. Kegiatan Pendukung.....	40

IKM. 14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	41
A.	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	41
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	42
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	42
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	42
E.	Kegiatan Pendukung	42
IKM. 15.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Padang (%)	42
A.	Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK	42
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	42
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	43
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	43
E.	Kegiatan Pendukung	43
IKM. 16.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)	43
A.	Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM	43
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	43
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	44
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	44
E.	Kegiatan Pendukung	44
IKM. 17.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Padang (Nilai)	44
A.	Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	45
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	45
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	45
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	45
E.	Kegiatan Pendukung	45
IKM. 18.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Padang (%)	45
A.	Capaian Persentase RUP PBJ yang Diumumkan pada SIRUP	46
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	46
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	46
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	46
E.	Kegiatan Pendukung	46
IKM. 19.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	46
A.	Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik	47



B.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025	47
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan	47
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	47
E.	Kegiatan Pendukung	47
3. 2.	Realisasi Anggaran	48
IV.	Penutup	50
4.1.	Kesimpulan	50
4.2.	Rekomendasi	51
4.3.	Tindak Lanjut Rekomendasi	51
LAMPIRAN		52

Daftar Gambar

Gambar 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2025.....	2
Gambar 2. Komposisi Pegawai BPSPL Padang	2
Gambar 3. Profil ASN di BPSPL Padang.....	3
Gambar 4. Sebaran Nama Jabatan Pegawai di BPSPL Padang.....	3
Gambar 5. Struktur Organisasi BPSPL Padang.....	4
Gambar 6. Analisis SWOT Lingkungan Strategis BPSPL Padang.....	8
Gambar 7. Komposisi Pagu Anggaran BPSPL Padang Tahun 2025	12
Gambar 8. NKO BPSPL Padang Triwulan II 2025	15
Gambar 9. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS dengan Yayasan Fifan Laut Nusantara	19
Gambar 10. Pendataan Terubuk di Provinsi Riau	21
Gambar 11. Pendataan Belida di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan	21
Gambar 12. Penanganan Biota Laut Dilindungi	22
Gambar 13. Penanganan Kemunculan Buaya di Wilayah Kerja BPSPL Padang.....	22
Gambar 14. Perolehan PNPB BPSPL Padang Triwulan II 2025.....	24
Gambar 15. Pendataan Hiu dan Pari di PPS Lampulo, Banda Aceh	24
Gambar 16. Pendataan Hiu dan Pari di PPN Idi, Aceh Timur.....	25
Gambar 17. Pendataan Hiu dan Pari di Ujung Serangga, Aceh Barat Daya	25
Gambar 18. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Jaya	25
Gambar 19. Pendataan Hiu dan Pari di Kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan	26
Gambar 20. Pendataan Hiu dan Pari di Pantai Penampar, Kabupaten Bengkalis.....	26
Gambar 21. Pendataan Sidat di Kabupaten Agam	27
Gambar 22. Piagam Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Triwulan I 2025.....	28
Gambar 23. Piagam Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Triwulan II 2025.....	28
Gambar 24. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I 2025	29
Gambar 25. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II 2025	30
Gambar 26. Penilaian Teknis KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Triwulan II 2025	32
Gambar 27. Penilaian Teknis yang Dilaksanakan oleh BPSPL Padang Triwulan II 2025.....	33
Gambar 28. Verifikasi Lapangan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Triwulan II 2025	33
Gambar 29. Identifikasi KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Triwulan II 2025	34
Gambar 30. Pengendalian KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Triwulan II 2025	34
Gambar 31. Status Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terhadap BPSPL Padang.....	41
Gambar 32. Tampilan Website PPID BPSPL Padang.....	47

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang (Awal)	9
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	10
Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	10
Tabel 4. Perubahan Indikator Kinerja Tahun 2025	11
Tabel 5. Rincian Blokir Efisiensi (I)	13
Tabel 6. Rincian Blokir Efisiensi Pasca Pergeseran Kode Blokir	13
Tabel 7. Perkembangan Rincian Blokir pada Juni 2025	13
Tabel 8. Rincian Capaian Kinerja BPSPL Padang pada Triwulan II 2025	15
Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1	16
Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2	17
Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3	18
Tabel 12. Penyampaian Draf PKS	19
Tabel 13. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4	20
Tabel 14. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5	23
Tabel 15. Rekapitulasi Pelayanan Jenis Triwulan II 2025	24
Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6	27
Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian IKU 7	31
Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian IKU 8	31
Tabel 19. Perbandingan Target dan Capaian IKM 9	35
Tabel 20. Perbandingan Target dan Capaian IKM 10	36
Tabel 21. Nilai IKPA Triwulan II 2025	36
Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian IKM 11	38
Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12	38
Tabel 24. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13	40
Tabel 25. Capaian IP ASN BPSPL Padang Triwulan II 2025	40
Tabel 26. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14	41
Tabel 27. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15	42
Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16	43
Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian IKM 17	45
Tabel 30. Perbandingan Target dan Capaian IKM 18	46
Tabel 31. Perbandingan Target dan Capaian IKM 19	47
Tabel 32. Realisasi Anggaran BPSPL Padang Hingga Triwulan II 2025	48

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

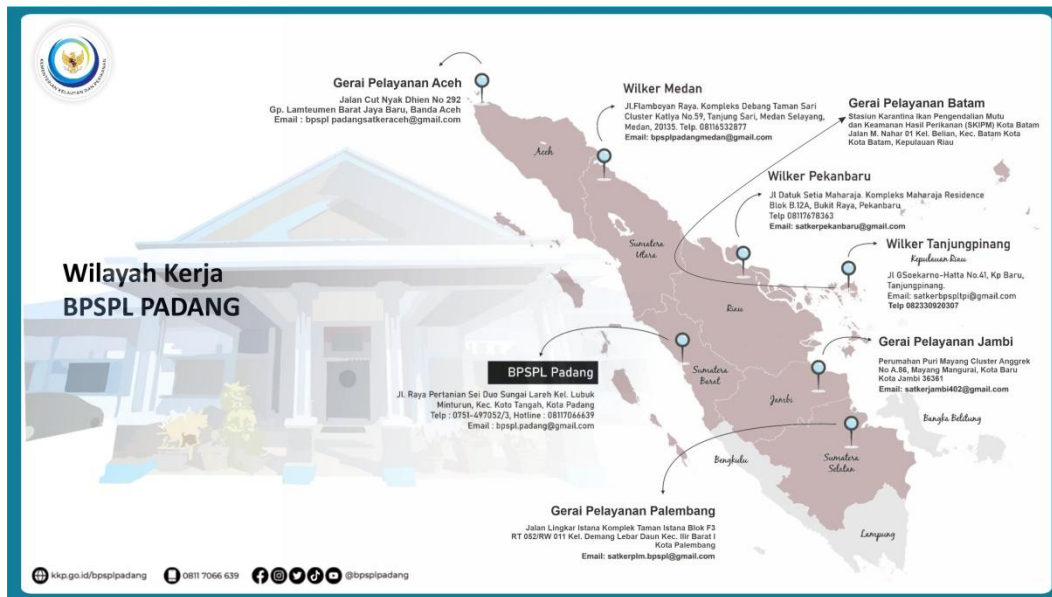
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Triwulan II 2025 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam penyajiannya, laporan ini dilengkapi dengan hasil capaian target dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSPL Padang yang berpedoman pada sasaran strategis yang diturunkan dalam bentuk Indikator Kinerja (IK). Adapun hasil capaian kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana, prasarana, dan anggaran pendukung kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan BPSPL Padang.

1.2 Tugas dan Fungsi

BPSPL Padang sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki peran dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang berorientasi menyukseskan rencana pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang termaktub dalam prioritas nasional yaitu lingkungan hidup, penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil disertai penguasaan dan pengelolaan risiko. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir adalah:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
2. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
3. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
4. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetic ikan;
5. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
8. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BPSPL Padang memiliki wilayah kerja meliputi tujuh (7) Provinsi se-Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup 60 Kabupaten/Kota Pesisir se-Sumatera. Selain itu, BPSPL Padang juga memiliki kantor wilayah kerja/satuan kerja (Satker) dan gerai pelayanan di Medan, Tanjungpinang, Pekanbaru, Banda Aceh, Jambi, Palembang, dan Batam.



Gambar 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2025

Total Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BPSPL Padang pada tahun 2024 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 76 orang, yang terdiri dari 53 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 orang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), 3 orang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP), dan 15 orang berstatus sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP). Lebih lanjut, mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tim Kerja lingkup BPSPL Padang terdiri dari empat tim, meliputi Perlindungan dan Pelestarian, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut, dan Dukungan Manajemen.



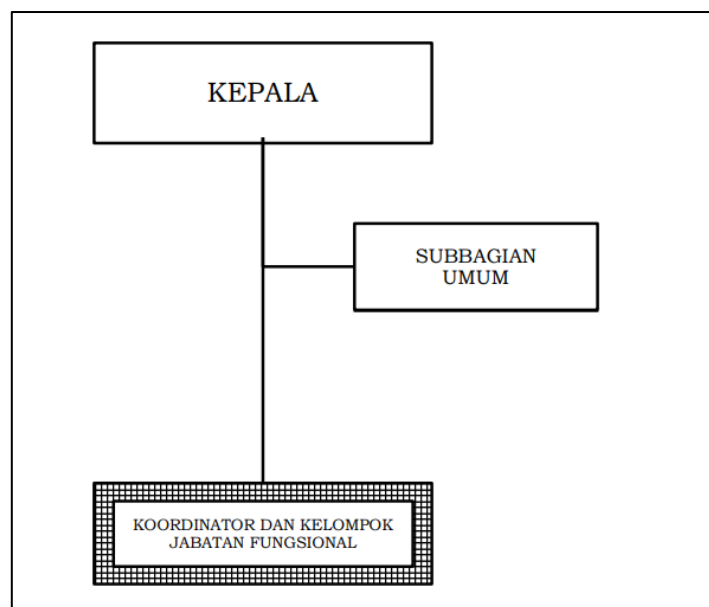
Gambar 2. Komposisi Pegawai BPSPL Padang



Gambar 3. Profil ASN di BPSPL Padang



Gambar 4. Sebaran Nama Jabatan Pegawai di BPSPL Padang



Gambar 5. Struktur Organisasi BPSPL Padang

1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecilnya yang sangat potensial. Indonesia memiliki *megabiodiversity*, yang mencakup keanekaragaman genetic, spesies, dan ekosistem. Kondisi tersebut memberikan beragam manfaat melalui penyediaan jasa ekosistem, baik penyediaan makanan dan obat-obatan, sebagai penyangga kehidupan ekosistem, serta memberikan beragam manfaat ekonomi jika dikelola secara bijak. Pengelolaan yang bertanggung jawab memberikan *multiplier effect* yang akan mengantarkan pada kondisi lingkungan pesisir dan pulau kecil yang optimal sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketahanan pangan, berketahanan iklim dan meningkatkan kesejahteraan.

Wilayah kerja BPSPL Padang memiliki karakteristik perairan yang khas. Di bagian barat, khas dengan ekosistem pesisir yang dipengaruhi oleh dinamika perairan Samudera Hindia, sedangkan di bagian timur, khas dengan beragam tipe ekosistem yang dipengaruhi oleh kondisi perairan Selat Malaka. Kondisi tersebut memberikan beragam potensi keanekaragaman hayati yang melimpah. Berikut adalah beberapa potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah kerja BPSPL Padang:

- 1) Perencanaan Ruang Laut
 - a. Enam provinsi dari tujuh provinsi wilayah kerja BPSPL Padang telah mencapai proses integrasi RTRW Provinsi,
 - b. Telah terbit 442 perizinan KKPR di wilayah kerja BPSPL Padang dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024.
- 2) Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut
 - a. Terdapat luas kawasan konservasi perairan daerah sebesar 4,84 Juta Ha di wilayah kerja BPSPL Padang yang perlu didorong pengelolaannya secara optimum;
 - b. Letak Indonesia yang berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*), menjadikan Indonesia dipertimbangkan sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang dunia. Sebanyak sekitar 569 jenis karang yang termasuk dalam 82 genus karang dijumpai di Indonesia. Berdasarkan kebijakan satu peta (*one map policy*) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011, dirilis bahwa luas terumbu karang di Indonesia berdasar analisis dari citra satelit adalah sekitar 2.517.858 Ha, dimana 19% atau sekitar 478.587 Ha diantaranya berada di Perairan Sumatera;

- c. Terdapat 13 target kehati prioritas pengelolaan KKP di wilayah kerja BPSPL Padang meliputi: Penyu, Kuda Laut, Napoleon, Sidat, Teripang, Lola, Kima, Terubuk, Hiu, Pari dan mamalia laut (Paus, Dugong) serta Karang;
 - d. Keanekaragaman hayati endemik yang hanya dijumpai di selat Malaka, yaitu terubuk jenis *Tenuailosa ilisha* yang salah satu habitat pentingnya ada di Labuhan Batu, dan jenis *Tenuailosa macrura* yang ada di selat Bengkalis;
 - e. Keberadaan Penyu Belimbing di Betumonga yang merupakan salah satu jenis penyu langka di Wilayah Kerja BPSPL Padang;
 - f. Telah dilakukan upaya monitoring secara berkesinambungan melalui pendataan penyu belimbing di site betumonga (sejak tahun 2019), pendaratan Hiu dan Pari di Sibolga dan Aceh Selatan (sejak tahun 2019) serta Kuda Laut di Bintan (sejak tahun 2018);
 - g. Aksi bersama perlindungan keanekaragaman hayati laut melalui FKPP Sumbar dan Forum Pelestarian Terubuk Riau;
 - h. Terdapat potensi kelompok penggerak konservasi dengan kegiatan berupa perlindungan jenis, kawasan dan ekosistem pesisir di wilayah kerja BPSPL Padang.
 - i. Pangsa pasar internasional produk hiu pari non appendiks CITES meliputi beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, China, Italia. Spanyol, hingga Meksiko.
- 3) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil
- a. Potensi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sejumlah 39 PPKT di wilayah kerja BPSPL Padang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017;
 - b. Potensi luasan ekosistem mangrove di wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 810.171 Ha. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, KLHK, tahun 2020, Indonesia memiliki areal seluas 3.329.219 Ha. 16,43% luasan mangrove nasional tersebut berada di wilayah kerja BPSPL Padang, atau seluas 547,022 Ha, yang tersebar di Provinsi Aceh (32.824 Ha), Provinsi Sumatera Utara (57.898 Ha), Provinsi Sumatera Barat (18.084 Ha), Provinsi Sumatera Selatan (158.845 Ha), Provinsi Jambi (10.082 Ha), Provinsi Riau (212.857 Ha), dan Kepulauan Riau (56.432 Ha). Provinsi Riau merupakan Provinsi yang memiliki luasan mangrove terluas di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 38,91%, sedangkan Provinsi terendah luasannya adalah Provinsi Jambi yang hanya sebesar 1,84%.
 - c. Terdapat potensi kelompok pegiat mangrove di pesisir wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 49 Kelompok.
- 4) Pemanfaatan Jasa Kelautan
- a. Potensi petambak garam tradisional di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh;
 - b. Potensi distributor dan pengolah garam di Kab. Bireun yang telah berstandar nasional dengan jangkauan pasar regional;
 - c. Terdapat potensi jenis biota yang dapat dimanfaatkan sebagai produk biofarmakologi berupa rumput laut, kuda laut dan teripang;
 - d. Kawasan pesisir di Sibolga termasuk dala Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Sibolga dan sekitarnya yang dapat didukung pengembangannya melalui Desa Wisata

Seiring dengan perkembangannya, potensi yang dimiliki tersebut dapat menghasilkan tantangan dan permasalahan dalam pengelolaannya. Pada saat ini, BPSPL Padang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui berbagai program dan kegiatan. Sebagian tantangan tersebut adalah program dan kegiatan yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan sebagiannya lagi adalah tantangan terhadap dinamika kebijakan program pembangunan yang semakin kompleks. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1) Banyaknya kepentingan yang memanfaatkan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya di dalamnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan yang kurang memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya. Tarik menarik antar beragam kepentingan terhadap ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil menyebabkan beberapa provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, menjadi terkendala dalam upaya pengesahan ranperda RZWP3K nya, yang diharapkan mampu menjadi alat pengendalian pemanfaatan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Dalam rentang waktu 2015–2020, dari 7 Provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, 2 di antaranya masih belum dapat disahkan menjadi produk hukum sehingga perlu program akselerasi dan pendampingan yang lebih intensif, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tantangan secara lebih spesifik, adalah penyelesaian potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang laut diselesaikan melalui Penyusunan rencana zonasi antara kawasan (RZ KAW), rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ-KSNT);
- 2) Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebabkan perubahan tata Kelola terkait pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satunya adalah amanat untuk mengintegrasikan RTRW dan RZWP3K menjadi satu produk hukum tata ruang sebagai rujukan pemanfaatan ruang dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses integrasi tersebut menjadi tantangan untuk dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan akselerasi dan pendampingan penyusunannya. Proses integrasi tersebut merupakan suatu terobosan penting dalam melihat ruang perairan dan darat dalam satu persepektif integratif dan holistik. Namun demikian ada banyak penyesuaian substansi dan administrasi sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas, memenuhi kaidah keberlanjutan dan partisipasi masyarakat;
- 3) Pemanfaatan ruang laut dan potensi sumber daya di dalamnya perlu dikelola melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan mengikuti koridor keberlanjutan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang laut yang disusun. Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan dengan program dan kegiatan operasionalisasi permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);
- 4) Dalam rangka memenuhi Aichi Target yang memandatkan perlunya melakukan konservasi seluas 10% dari luas perairan, pesisir dan pulau kecil atau sekitar 32,5 juta Ha. Di wilayah kerja BPSPL Padang, kawasan konservasi perairan ada di semua Provinsi namun pengelolaannya belum efektif termasuk di dalamnya adalah upaya peningkatan status perlindungan kawasan konservasi yang baru pada status pencadangan dan belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana luasan kawasan konservasi yang akan dicapai dapat berjalan beriringan dengan efektivitas pengelolaannya sehingga keberadaan kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan serta nilai ekonomi kawasan. Salah satu program dan kegiatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplmentasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- 5) Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk

appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi. Tantangan selanjutnya adalah terkait adanya rencana pelimpahan kewenangan/*managemen authorities* untuk jenis ikan bersirip (pisces) dari KLHK kepada KKP. Terkait hal itu, maka UPT diharapkan mampu menyelenggarakan issue perdagangan jenis ikan yang sebelumnya dikelola oleh KLHK, dimana di dalamnya mencakup perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Salah satu dari jenis ikan tersebut adalah ikan Arwana, dimana komoditas tersebut termasuk banyak diperdagangkan di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan;

- 6) Wilayah kerja BPSPL Padang, memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, meliputi kuda laut, teripang, lola, kima, hiu-pari, mamalia laut, napoleon, dugong, penyu, sidat, terumbu karang, terubuk, ikan purba, dan beragam jenis kehati lainnya. Keberadaannya semakin terancam akibat semakin meningkatnya tekanan habitat di alam oleh aktivitas antropogenik meliputi over-eksploitasi, *bycatch*, *spesies invasive*, kerusakan habitat, dan lain sebagainya. Permasalahan ini mendorong perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengelolaan kehati agar dapat terjaga habitat dan keanekaragaman hayati di dalamnya sesuai dengan kerangka rencana aksi dari masing-masing keanekaragaman hayati prioritas pengelolaan. Kondisi tersebut diperparah dengan asih minimnya kesadartahuan masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat;
- 7) Meningkatnya dampak negatif adanya fenomena perubahan iklim menyebabkan permasalahan ketahanan pesisir, diantaranya adalah ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir serta kerusakan ekosistem terumbu karang akibat adanya *coral bleaching*. Hal ini dilakukan melalui rehabilitasi pesisir dengan program dan kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai serta penguatan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan ekosistem mangrove. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap adanya fenomena perubahan iklim di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 8) Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu jalur transportasi laut yang cukup padat. Kondisi tersebut membawa dampak terjadinya peningkatan pencemaran pesisir dan laut dengan meningkatnya intensitas kejadian tumpahan minyak. Kondisi tersebut mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati dan habitatnya. Sehingga perlu adanya program dan kegiatan yang dapat menjawab tantangan dari permasalahan tersebut;
- 9) Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem. BPSPL Padang telah diberikan mandat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penatakelolaan dan pendayagunaan PPKT agar menjadi objek dan asset pembangunan yang bernilai strategis untuk meningkatkan daya guna lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara. Dari 111 PPKT, 39 PPKT berada di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 7 PPKT di Provinsi Aceh, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Utara, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Barat, 22 PPKT di Provinsi Kepri, dan 4 PPKT di Provinsi Riau.
- 10) pemanfaatan ekonomi kelautan seperti pengelolaan produksi garam yang belum optimal. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu pemanfaatan ekonomi kelautan lainnya seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari perlu ditingkatkan kualitas pengelolaannya serta jasa kelautan terkait lainnya

Lebih lanjut, pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, yang tercantum dalam analisis *strength*, *weakness*, *opportunities*, *threat* (SWOT) berikut ini.



Gambar 6. Analisis SWOT Lingkungan Strategis BPSPL Padang

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk menginformasikan capaian kinerja triwulan II pada tahun 2025. Adapun capaian kinerja triwulan II 2025 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum terkait BPSPL Padang beserta perkembangan lingkungan kerja strategis.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian rencana strategis berisi visi dan misi organisasi serta perjanjian kinerja BPSPL Padang tahun 2025.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisis-analisis pendukungnya.
4. **Bab IV Penutup**, menyajikan simpulan umum serta langkah-langkah strategis pada masa mendatang.
5. **Lampiran**, melampirkan data-data pendukung laporan.

II. Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis DJPK 2025 s.d. 2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025 s.d. 2029 belum terbit ketika laporan ini disusun.

2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), BPSPL Padang memiliki tugas-tugas yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan Tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Padang berpedoman pada sasaran kegiatan yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Dalam perkembangannya, pada awal tahun 2025 ini terdapat delapan (8) sasaran kegiatan dan 18 indikator kinerja yang dimandatkan kepada BPSPL Padang. Adapun sasaran kegiatan dan IK tersebut termuat dalam Perjanjian Kinerja BPSPL Padang 2025 yang disajikan dalam tabel berikut (secara lengkap ditampilkan dalam Lampiran 1).

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang (Awal)

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang (Provinsi)	3
2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	2 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	25
3	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	3 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
4	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	4 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
5	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang	5 Jenis keanekaragaman Hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
6	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	2
7	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	7 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1
8	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Padang	8 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	88
		9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	92
		10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)	71,5
		11 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		12 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)	87

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	95
		14 Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		15 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)	85
		16 Nilai Pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang (Nilai)	80
		17 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	76
		18 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	91

Dalam perkembangannya, setelah adanya restrukturisasi organisasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, maka terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada Juni 2025. Dalam hal ini, BPSPL Padang memiliki target kinerja pada kedua unit kerja eselon 1 tersebut. Berikut adalah rincian Perjanjian Kinerja BPSPL Padang pasca restrukturisasi organisasi yang terdiri dari sembilan (9) sasaran kegiatan dan 19 indikator kinerja.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	2

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang (Provinsi)	3
2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	2 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	25
3	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	3 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
4	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	4 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
5	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang	5 Jenis keanekaragaman Hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
6	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)	80

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	7 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1
8	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Padang	8 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	70
		9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	89
		10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)	71,5
		11 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		12 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)	80
		13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	95
		14 Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		15 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)	85
		16 Nilai Pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang (Nilai)	80
		17 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	76
		18 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	91

Pada tahun 2024 lalu, setelah melalui dinamika revisi Perjanjian Kinerja, terdapat dua puluh dua indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2024. Ditinjau dari komposisinya, pada tahun 2025 ini terdapat indikator kinerja yang tidak lagi digunakan dan penambahan beberapa indikator kinerja baru. Perubahan indikator kinerja tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

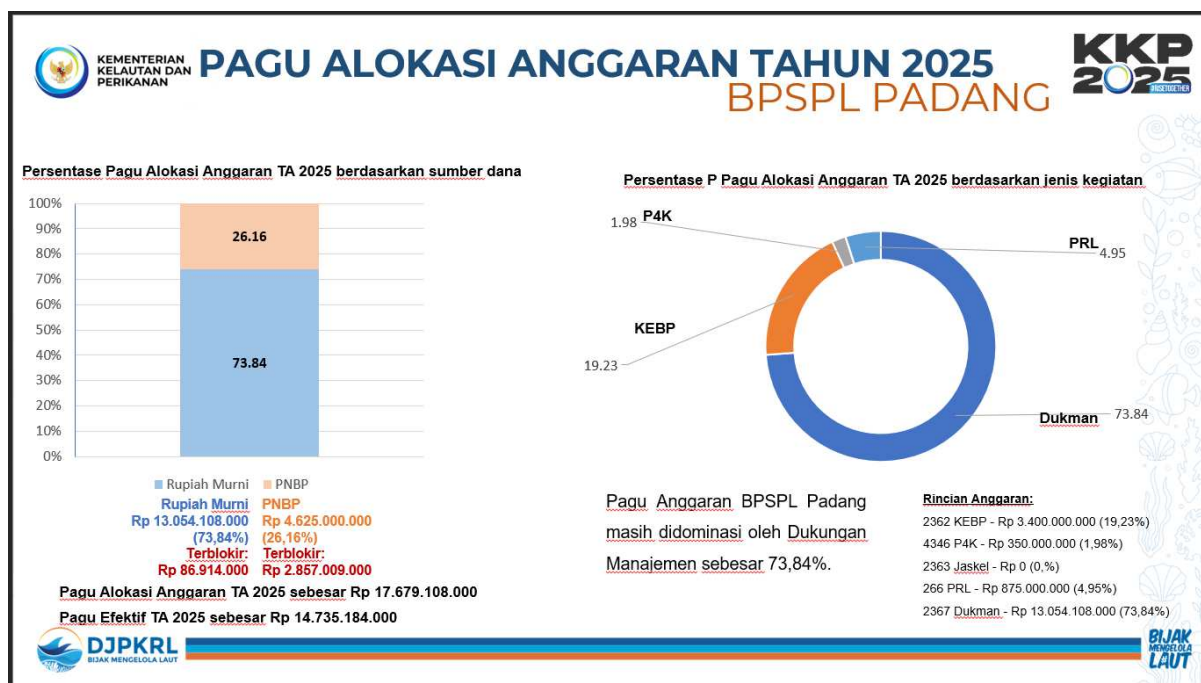
Tabel 4. Perubahan Indikator Kinerja Tahun 2025

Nomor	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Nilai PNPB BPSPL Padang (Rp.000)	Indikator Kinerja yang diukur pada tahun 2024 dan tidak lagi digunakan pada tahun 2025
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	
3	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)	
4	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	
5	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	
6	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	
7	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	
8	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)	

Nomor	Indikator Kinerja	Keterangan
9	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang (Provinsi)	Indikator Kinerja baru pada tahun 2025
10	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)	
11	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	
12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	
13	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	

2.3. Postur Anggaran 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja, pada tahun 2025 ini BPSPL Padang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 032.07.2.499346/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar **Rp17.679.108.000,00** (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 73,84% bersumber dari Rupiah Murni sementara 26,16% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun demikian, pada awal tahun terdapat blokir terhadap anggaran tersebut sejumlah Rp4.720.760.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Adanya blokir tersebut tidak mempengaruhi pagu anggaran secara keseluruhan, namun anggaran yang terblokir tersebut belum dapat digunakan.



Gambar 7. Komposisi Pagu Anggaran BPSPL Padang Tahun 2025

Dalam perkembangannya, terdapat revisi anggaran sebagai tindak lanjut adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, surat Menteri Keuangan Nomor S- 37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2025. Dalam hal ini, BPSPL Padang mengalami dua jenis blokir, yaitu blokir efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Kode Blokir A) dan blokir penggunaan dana bersumber dana dari Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Kode Blokir 2). **Total dua jenis blokir itu mencapai Rp 4.711.915.000,00.**

Tabel 5. Rincian Blokir Efisiensi (I)

Kode - Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Blokir (Rp)			Pagu Efektif (Rp)		
	Rupiah Murni	PNBP	Total	Kode A	Kode 2	Total	Rupiah Murni	PNBP	Total
KKHL		3.400.000	3.400.000	2.703.510	696.490	3.400.000		0	0
P4K		350.000	350.000	Rp277.690	72.310	350.000		0	0
Jaskel			0			0		0	0
PRL		875.000	875.000	619.059	255.941	875.000		0	0
Dukman	13.054.108		13.054.108	86.915		86.915	12.967.193		12.967.193
Total	13.054.108	4.625.000	17.679.108	3.687.174	1.024.741	4.711.915	12.967.193	0	12.967.193

*dalam ribu rupiah

Kemudian, dalam perkembangannya, kembali terdapat penyesuaian karena adanya pergeseran jenis blokir Kode A menjadi blokir Kode 2. Pergeseran blokir tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Rincian Blokir Efisiensi Pasca Pergeseran Kode Blokir

Kode - Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Blokir (Rp)			Pagu Efektif (Rp)		
	Rupiah Murni	PNBP	Total	Kode A	Kode 2	Total	Rupiah Murni	PNBP	Total
KKHL		3.400.000	3.400.000	2.390.480	1.009.511	3.400.000		0	0
P4K		350.000	350.000	127.000	223.000	350.000		0	0
Jaskel			0			0		0	0
PRL		875.000	875.000	339.520	535.480	875.000		0	0
Dukman	13.054.108		13.054.108	86.915		86.915	12.967.193		12.967.193
Total	13.054.108	4.625.000	17.679.108	2.943.924	1.767.991	4.711.915	12.967.193	0	12.967.193

*dalam ribu rupiah

Kemudian, pada revisi RKAKI tanggal 17 Juni 2025, terdapat kebutuhan revisi untuk buka blokir sebesar Rp1.767.991.000,00. Maka dari itu, **total anggaran yang terblokir menjadi Rp2.943.924.000,00.**

Tabel 7. Perkembangan Rincian Blokir pada Juni 2025

Kode - Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Blokir (Rp)			Pagu Efektif (Rp)		
	Rupiah Murni	PNBP	Total	Kode A	Kode 2	Total	Rupiah Murni	PNBP	Total
KKHL		3.400.000	3.400.000	2.390.480		2.390.480		1.009.511	1.009.511
P4K		350.000	350.000	127.000		127.000		223.000	223.000

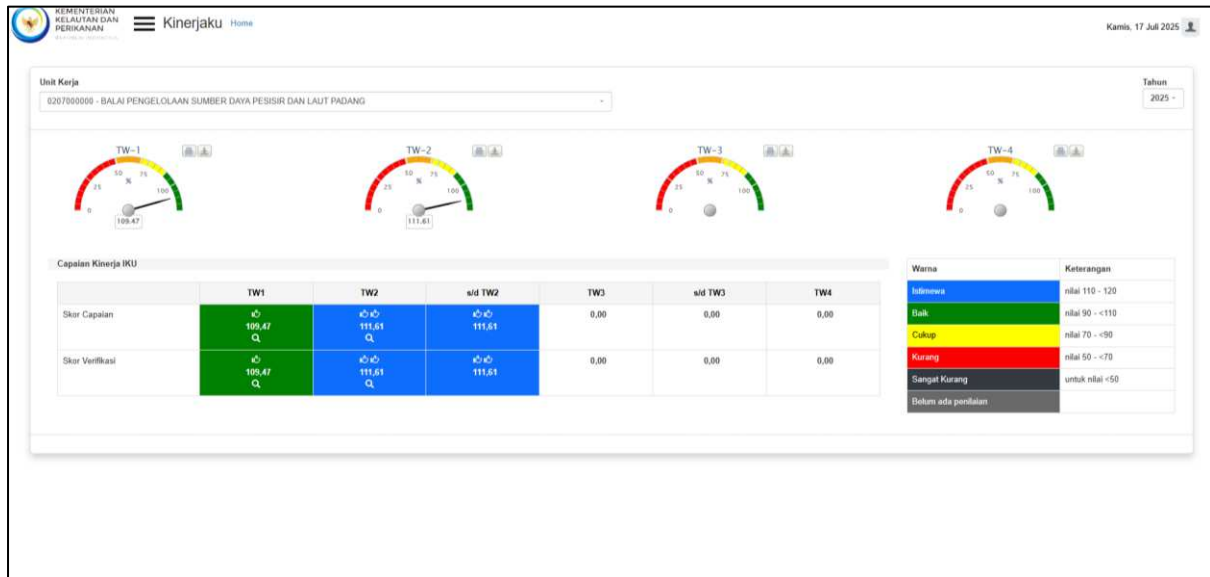
Kode - Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Blokir (Rp)			Pagu Efektif (Rp)		
	Rupiah Murni	PNBP	Total	Kode A	Kode 2	Total	Rupiah Murni	PNBP	Total
Jaskel			0						0
PRL		875.000	875.000	339.520		339.520		535.480	535.480
Dukman	13.054.108		13.054.108	86.915		86.915	12.967.193		12.967.193
Total	13.054.108	4.625.000	17.679.108	2.943.924	0	2.943.924	12.967.193	1.767.991	14.735.184

*dalam ribu rupiah

III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Padang dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang periode triwulan II 2025 adalah **111,61 (kategori istimewa)**.



Gambar 8. NKO BPSPL Padang Triwulan II 2025

Pada tahun 2025 ini, Perjanjian Kinerja BPSPL Padang terdiri dari sembilan (9) sasaran strategis dan 19 indikator kinerja dengan periode capaian triwulanan, semesteran, dan tahunan. Sementara itu, rincian target dan capaian kinerja BPSPL Padang pada triwulan II 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Rincian Capaian Kinerja BPSPL Padang pada Triwulan II 2025

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2025	CAPAIAN TW II 2025	PERSENTASE CAPAIAN (%)
8	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Padang	9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	85	98,08	115,39
		11 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	2	2	100
		12 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks	78	88,51	113,47
		13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	95	100	105,26
		17 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	76	100	131,58 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku

IKU. 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah adalah Provinsi yang didampingi dan difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Padang yang didampingi dalam proses penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah.

A. Capaian Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah

Rincian target IKU 1 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1

IKU 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Provinsi)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	3	-

Pada periode triwulan II 2025, belum terdapat capaian terhadap IKU ini karena ditargetkan dengan periode tahunan. Capaian IKU ini didukung oleh pendampingan dalam penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Padang.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

IKU ini tidak digunakan pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 pun memiliki frekuensi pengukuran tahunan. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan II.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung dalam upaya pencapaian IKU ini adalah komunikasi dan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem perihal ruang lingkup kegiatan, mekanisme, jadwal pelaksanaan, dan peran pendampingan BPSPL Padang dalam Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah. Selain itu, BPSPL Padang juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang didampingi dalam penilaian untuk mempersiapkan aspek-aspek penilaian yang diperlukan. Saat ini, anggaran pendukung kegiatan ini masih dalam kondisi terblokir sehingga belum terdapat perkembangan kegiatan.

E. Kegiatan Pendukung

Hingga Triwulan II 2025 berakhir, belum terdapat kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah. Selain itu, anggaran pendukung kegiatan ini juga masih dalam kondisi terblokir. Sementara itu, BPSPL Padang telah melaksanakan kegiatan pendampingan dalam pengusulan Kawasan Konservasi Daerah sebagaimana berikut.

1. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Maspari, Sumatera Selatan melalui Zoom Meeting pada 7 Februari 2025,
2. Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Teknis Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui Zoom Meeting pada 13 Februari 2025,

3. Rapat Kelompok Kerja Kawasan Konservasi Batam dan Lingga pada 12 Juni 2025 di Ruang Rapat Kerapu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau,
4. Pembahasan Rancangan KEPMEN KP tentang Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Maspari Provinsi Sumatera Selatan pada 12 Juni 2025 melalui Zoom Meeting, dan
5. Lokakarya Persiapan Perancangan Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan Batam dan Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada 25 s.d. 26 Juni 2025 di Hotel Aston Tanjungpinang.

IKU. 2. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang)

Masyarakat di kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas dalam pemanfaat kawasan konservasi melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dengan menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Capaian Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Rincian target IKU 2 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2

IKU. 2. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang)						
Tahun 2024		Tahun 2025				
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	25	-

Pada periode triwulan II 2025, belum terdapat capaian terhadap IKU ini karena ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

IKU ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan II.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian Indikator Kinerja ini didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat yang diundang pada kegiatan pengembangan kompetensi. Partisipasi aktif tersebut dapat ditunjang oleh penyampaian materi yang menyeluruh, narasumber yang kompeten, dan sesi diskusi yang interaktif. Saat ini, anggaran pendukung kegiatan ini masih dalam kondisi terblokir sehingga belum terdapat perkembangan kegiatan.

E. Kegiatan Pendukung

Hingga triwulan II 2025 berakhir, belum terdapat kegiatan pendukung Indikator Kinerja ini yang telah terlaksana yang mana disebabkan oleh terblokirnya anggaran pendukung akibat efisiensi anggaran.

IKU. 3. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)

Kegiatan inisiasi penyusunan draft Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih Lembaga/badan/ organisasi untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama dapat dilakukan dengan kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian. Pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha/ industri/ perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dengan cara Menginventarisasi dan menjumlahkan draft kerja sama yang disusun/difasilitasi penyusunannya di wilayah kerja BPSPL Padang untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon 1.

A. Capaian Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi

Rincian target IKU 3 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3

IKU 3. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	1	-

Pada periode triwulan II 2025, belum terdapat capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Pada tahun 2024 dan 2025, IKU ini memiliki target tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

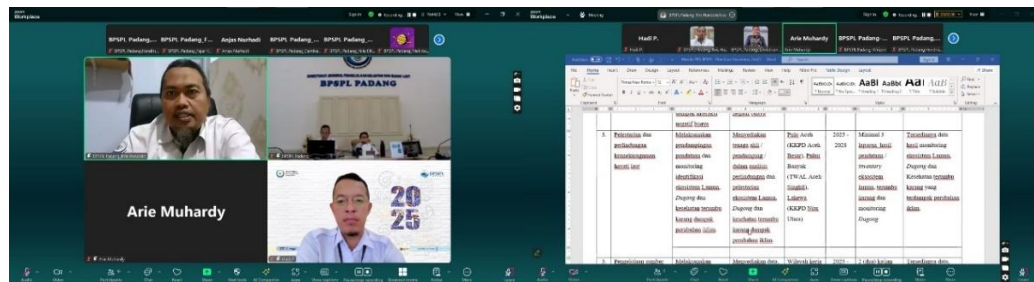
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh koordinasi aktif dengan calon mitra. Sepanjang triwulan II 2025, BPSPL Padang telah melaksanakan pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama daring. Dengan dilaksanakan koordinasi berbasis daring, masing-masing pihak dapat mengikuti pembahasan lebih fleksibel. Maka dari itu, pencapaian IKU ini sangat terbantu dengan penggunaan aplikasi Zoom yang dapat memfasilitasi pertemuan berbasis daring.

E. Kegiatan Pendukung

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh serangkaian kegiatan berikut.

1. Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama BPSPL Padang dengan Yayasan Fifan Laut Nusantara melalui Zoom Meeting pada 13 Februari 2025
2. Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama BPSPL Padang dengan Yayasan Fifan Laut Nusantara pada 4 Maret 2025 melalui Zoom Meeting



Gambar 9. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS dengan Yayasan Fifan Laut Nusantara

3. Pembahasan Inisiasi PKS dengan PT MIFA Bersaudara pada 23 April 2025 melalui Zoom Meeting
4. Penyampaian Draf Perjanjian Kerja Sama antara DJPK dan PT Mifa Bersaudara dan KOMPAK Pusong Diving Club pada 7 Mei 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELLURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175 TELEPON (0751) 497052, FAKS (0751) 497053 LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bpspl.padang@kkp.go.id Nomor : B.636/BPSPL.1/TU.210/V/2025 7 Mei 2025 Sifat : Biasa Lampiran : Satu Berkas Hal : Penyampaian Draf Perjanjian Kerja Sama Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Jakarta Pusat Sehubungan dengan adanya rencana kerja sama yang diinisiasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dengan PT Mifa Bersaudara dan KOMPAK Pusong Diving Club, bersama ini dengan hormat kami sampaikan draf Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah dibahas bersama dengan para pihak. Berkaitan dengan hal dimaksud, kami mohon perkenan Bapak untuk memproses lebih lanjut dokumen tersebut. Dapat kami laporkan kepada Bapak, bahwa Perjanjian Kerja Sama disusun dalam rangka memperkuat upaya Rehabilitasi Terumbu Karang di Coral Stock Centre (CSC) Pulau Pusong Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai bagian dari dukungan penguatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dan dukungan pemberdayaan masyarakatnya. Adapun rencana ruang lingkup yang akan dikerjasamakan para pihak meliputi dukungan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi terumbu karang; pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan Aceh Barat Daya terkait upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau - pulau kecil; dan penguatan pengelolaan kawasan konservasi perairan Aceh Barat Daya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih. Pt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang,  Hendrisman Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PT MIFA BERSAUDARA DAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGGERAK KONSERVASI PUSONG DIVING CLUB NOMOR: xxx/xxxx/xx.xx.xx/2025 NOMOR: xxx/PPKS-MIFA/LGLMD/IV/2025 NOMOR: xxx/xxxx/xxxxxx/2025 TENTANG PENGUATAN PENGELOLAAN EFEKTIF KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ACEH BARAT DAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI REHABILITASI TERUMBU KARANG DI CORAL STOCK CENTER PULAU PUSONG Pada hari ini, Jumat tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (06-06-2025), bertempat di Banda Aceh, Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : Miftahul Huda Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur, No. 16 Gedung Minabahari III Lt. 9, DKI Jakarta. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "PIHAK KESATU". II. Nama : Ricky Nelson Jabatan : Direktur Utama PT Mifa Bersaudara Alamat : Jalan Meulaboh - Tapaktuan KM.8, Desa Peunaga Cut Ujong, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mifa Bersaudara, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "PIHAK KEDUA". Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
--	---

Tabel 12. Penyampaian Draft PKS

IKU. 4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Padang adalah Jenis ikan yang diintervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilaksanakan pada 5 (lima) jenis target yaitu: penyu, terubuk, terumbu karang, kima, dan belida.

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

1. Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis: Penyu, Terubuk, Terumbu Karang, Kima dan Belida.
2. Perbaikan habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Terumbu Karang.

3. Penyadartahuan/Edukasi/Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah serta Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi

A. Capaian Jenis Ikan Dilindungi yang Dilakukan Upaya Pengelolaannya

Rincian target IKU 4 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 13. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4

IKU 4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	5	-

Hingga berakhirnya periode triwulan II 2025, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Pada tahun 2024 dan 2025, IKU ini memiliki target tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung dalam pencapaian IKU ini adalah adanya dukungan dari pihak lain pada kegiatan respon cepat penanganan biota terdampar. Pada kegiatan respon cepat, BPSPL Padang kerap berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat, Dinas, LSM, dan stakeholder setempat lainnya. Terdapat kegiatan pendataan beberapa jenis yang sudah tidak terblokir anggarannya sehingga pendataan dapat dilanjutkan kembali, yaitu jenis terubuk, belida, dan penyu (pendataan sesuai musimnya mulai November). Anggaran untuk respon cepat penanganan biota dilindungi juga sudah tidak terblokir. Sementara itu, sebagian anggaran pendukung masih dalam kondisi terblokir.

E. Kegiatan Pendukung

Hingga triwulan II 2025 berakhir, terdapat beberapa kegiatan pendukung yang belum terlaksana sehubungan dengan anggaran pendukung kegiatan yang masih terblokir. Adapun kegiatan pendukung IKU ini yang telah terlaksana adalah sebagai berikut.

1. Pendataan Terubuk di Provinsi Riau

Di Bengkalis dan Siak, Provinsi Riau pendataan terubuk jenis *Tenualosa macrura* dilakukan pada fase bulan gelap (27, 28, 29, 30) dan bulan terang (13, 14, 15, dan 16) penanggalan hijriah dengan dibantu oleh tenaga enumerator. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah pendekatan Length Based-Spawning Potential Ratio (LB-SPR) yang dapat menggambarkan status eksploitasi stok perikanan, yang secara umum dapat mengacu kepada kriteria yang ditetapkan oleh NOAA Fisheries dalam Badaruddin (2013). Pendataan dimulai pada Januari, kemudian terhenti sehubungan adanya efisiensi anggaran. Kemudian, pendataan kembali dilanjutkan pada bulan Juli hingga Desember 2025.



Gambar 10. Pendataan Terubuk di Provinsi Riau

2. Pendataan Belida di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan

Pendataan sempat terlaksana pada Januari 2025, namun terhenti sementara karena anggaran pendukung kegiatan yang masih terblokir. Hingga saat ini, pendataan belum berlanjut kembali.



Gambar 11. Pendataan Belida di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan

3. Pendataan Belida di Kabupaten Tebo, Jambi

Pendataan sempat terlaksana pada Januari 2025, namun terhenti sementara karena anggaran pendukung kegiatan yang masih terblokir. Hingga saat ini, pendataan belum berlanjut kembali.

4. Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi

Hingga triwulan II 2025, tercatat 6 kejadian mamalia/jenis ikan terdampar di wilayah kerja BPSPL Padang. Tabel berikut menyajikan kejadian yang ditangani langsung oleh BPSPL Padang.

Gambar 12. Penanganan Biota Laut Dilindungi

No	Lokasi	Tanggal	Jenis	Kode	Penanganan
1	Desa Matuptuman Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat	23 Januari 2025	Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>)	1	Dilepasliarkan
2	Pantai Desa Angkeo, Kecamatan Teupah Barat, Kab. Simeulue, Provinsi Aceh	11 Maret 2025	Paus Balin Omura (<i>Balaenoptera omurai</i>)	3	Dibiarkan terurai secara alami
3	Pantai Green Salido Park, Kampung Balai Lamo, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Sumatra Barat	25 April 2025	Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>)	1	Dilepasliarkan
4	Pantai Green Salido Park, Kampung Balai Lamo, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Sumatra Barat	29 April 2025	Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>)	1	Dilepasliarkan
5	Pantai Muaro Anai, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah	3 Juni 2025	Lumba-lumba Moncong Panjang (<i>Stenella longirostris</i>)	1	Dilepasliarkan
6	Sungai Batang Anai, Kecamatan Batang Anai	5 Juni 2025	Lumba-lumba Moncong Panjang (<i>Stenella longirostris</i>)	1	Dipantau ke lokasi

Sementara itu, BPSPL Padang juga telah merespon 67 kejadian kemunculan/serangan buaya di wilayah kerja BPSPL Padang.



Gambar 13. Penanganan Kemunculan Buaya di Wilayah Kerja BPSPL Padang

IKU. 5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/ atau look alike species (Hiu Apendiks dan Pari Apendiks);
- Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan (Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Kuda Laut, Napoleon dan Sidat).

Target Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Pemanfaatan adalah Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Kuda Laut, Napoleon dan Sidat di wilayah kerja BPSPL Padang. Adapun capaian indikator ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike spesies dan Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Capaian Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan

Rincian Target IKU 5 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5

IKU 5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 – TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	5	-

Pada periode triwulan II 2025, belum terdapat capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Pada tahun 2024 dan 2025, IKU ini memiliki target tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya pencapaian IKU ini didukung dengan koordinasi dan verifikasi jarak jauh dalam pelayanan perizinan pemanfaatan ikan sehingga kegiatan pelayanan dapat tetap berjalan secara daring. Hingga saat ini, sebagian anggaran pendukung masih dalam kondisi terblokir. Namun demikian, anggaran untuk pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dan pendataan beberapa jenis ikan yang dimanfaatkan sudah tidak terblokir. Adapun kegiatan pendataan yang dapat dilanjutkan meliputi hiu, pari dan sidat.

E. Kegiatan Pendukung

Hingga triwulan II 2025 berakhir, terdapat beberapa kegiatan pendukung yang belum terlaksana sehubungan dengan anggaran pendukung kegiatan yang masih terblokir. Adapun kegiatan pendukung IKU ini yang telah terlaksana adalah sebagai berikut.

1. Pelayanan Perizinan Jenis Ikan yang Dimanfaatkan

Kegiatan pelayanan perizinan jenis ikan yang dimanfaatkan dilaksanakan di tujuh provinsi wilayah kerja BPSPL Padang, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sepanjang triwulan II 2025, BPSPL Padang telah melayani perizinan pemanfaatan jenis hiu, pari, arwana, dan teripang melalui penerbitan 154 Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN) dan 254 Rekomendasi.

Berikut adalah rekapitulasi pelayanan berdasarkan dari penerbitan SAJI dan rekomendasi.

Tabel 15. Rekapitulasi Pelayanan Jenis Triwulan II 2025

Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen yang Terbit	Nilai PNPB (Rp)
Rekomendasi	254	176.484.684,00
SAJI Dalam Negeri	154	200.117.732,00
Total	408	376.602.416,00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 06

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,805,091	0	0	1,309,532	0	3,114,623
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0
3	425259 Pendapatan Perizinan Lainnya	0	134,460,000	0	0	0	(675,000)	133,785,000
4	425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	242,142,416	0	0	0	(1,713,100)	240,429,316
GRAND TOTAL		0	378,407,507	0	0	1,309,532	(2,388,100)	377,328,939

Gambar 14. Perolehan PNPB BPSPL Padang Triwulan II 2025
(Sumber: Aplikasi OM SPAN, Juli 2025)

2. Pendataan Hiu dan Pari di Banda Aceh

Pendataan dilaksanakan dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Januari, kemudian dilanjutkan kembali pada Juni hingga Desember 2025. Adapun terhentinya pendataan tersebut disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan.



Gambar 15. Pendataan Hiu dan Pari di PPS Lampulo, Banda Aceh

3. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Timur

Pendataan dilaksanakan dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Januari, kemudian dilanjutkan kembali pada Juni hingga Desember 2025. Adapun terhentinya pendataan tersebut disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 16. Pendataan Hiu dan Pari di PPN Idi, Aceh Timur

4. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Barat Daya

Pendataan dilaksanakan dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Januari, kemudian dilanjutkan kembali pada Juni hingga Desember 2025. Adapun terhentinya pendataan tersebut disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 17. Pendataan Hiu dan Pari di Ujung Serangga, Aceh Barat Daya

5. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Jaya

Pendataan dilaksanakan dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Juni hingga Desember 2025. Adapun dimulainya pendataan pada Juni disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 18. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Jaya

6. Pendataan Hiu dan Pari di Bintan

Pendataan dilaksanakan dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Juni hingga Desember 2025. Adapun dimulainya pendataan pada Juni disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 19. Pendataan Hiu dan Pari di Kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan

7. Pendataan Hiu dan Pari di Bengkalis

Pendataan dilaksanakan dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Januari, kemudian dilanjutkan kembali pada Juni hingga Desember 2025. Adapun terhentinya pendataan tersebut disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 20. Pendataan Hiu dan Pari di Pantai Penampar, Kabupaten Bengkalis

8. Pendataan Sidat di Agam

Pendataan dilaksanakan dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Januari, kemudian dilanjutkan kembali pada Juli hingga Desember 2025. Adapun terhentinya pendataan tersebut disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 21. Pendataan Sidat di Kabupaten Agam

IKU. 6. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan 27enetic merupakan nilai terendah yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan 27enetic. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dari penjumlahan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari (SIPJI (Verifikasi lapangan), SAJI-DN, SKM dan penerapan konvensi). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum (bobot\ aspek \times \sum A) + \sum (bobot\ aspek \times \sum B) + \sum (bobot\ aspek \times \sum C) + \sum (bobot\ aspek \times \sum D)$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI

(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Penerapan Konvensi

A. Capaian Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan

Rincian target IKU 6 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6

IKU. 6. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)						
Tahun 2025	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 – TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	80	-

Belum terdapat capaian IKU ini pada triwulan II 2025. Pencapaian IKU ini ditargetkan tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak terdapat pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh kinerja petugas pelayanan BPSPL Padang dalam perizinan pemanfaatan jenis ikan. Selain kinerja dalam penerbitan produk layanan, kepuasan masyarakat juga merupakan aspek yang dinilai. Dalam praktiknya, BPSPL Padang senantiasa menerapkan pelayanan prima dan mengapresiasi petugas pelayanan terbaik setiap triwulannya.

E. Kegiatan Pendukung

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh kegiatan berikut.

1. Apresiasi Petugas Pelayanan Terbaik BPSPL Padang



Gambar 22. Piagam Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Triwulan I 2025

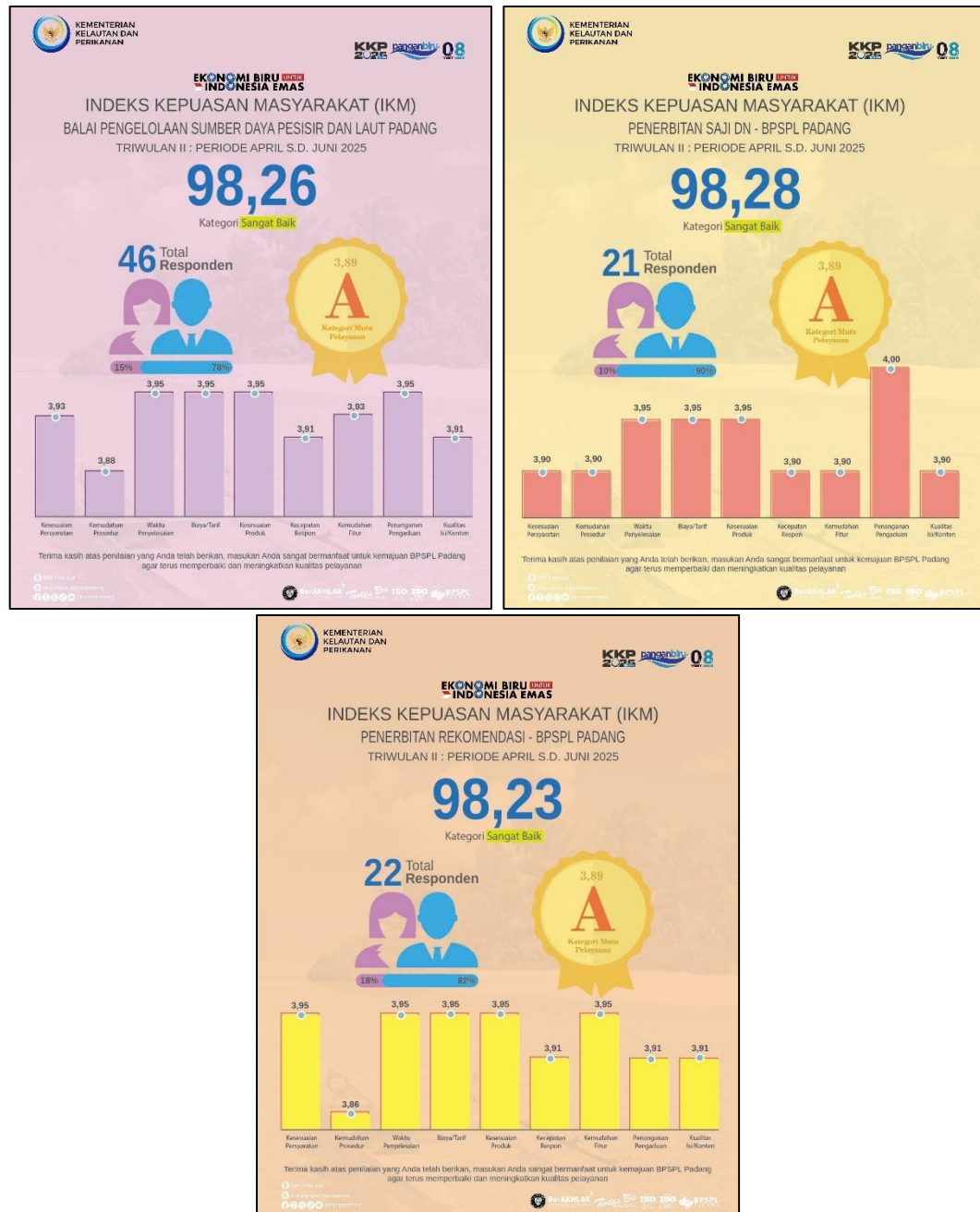


Gambar 23. Piagam Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Triwulan II 2025

2. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat



Gambar 24. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I 2025



Gambar 25. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II 2025

IKU. 7. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)

Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dari menjumlahkan dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun

Rincian target IKU 7 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian IKU 7

IKU 7. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 – TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	1	-

Belum terdapat capaian IKU ini pada triwulan II 2025. Pencapaian IKU ini mulai ditargetkan tahunan.

B. Perbandingan Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

IKU ini tidak digunakan pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 pun memiliki frekuensi pengukuran tahunan. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja pada triwulan II.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Anggaran pendukung kegiatan ini terdampak blokir sehingga belum terdapat realisasi kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini.

E. Kegiatan Pendukung

Anggaran pendukung kegiatan Indikator ini terdampak blokir sehingga kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil belum terlaksana hingga berakhirnya triwulan II. Sementara itu, BPSPL Padang terlibat dalam Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 15 s.d. 17 Januari 2025. Dalam perkembangannya, anggaran pendukung kegiatan sudah tidak terblokir sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlanjut.

IKU. 8. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi/verifikasi dan monitoring/pengendalian pemanfaatan ruang laut. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dari Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi/verifikasi dan monitoring/pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

Rincian target IKU 8 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian IKU 8

IKU 8. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 – TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	2	-

Belum terdapat capaian IKU ini pada triwulan II 2025. Pencapaian IKU ini ditargetkan tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Pada tahun 2024 dan 2025, IKU ini memiliki target tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

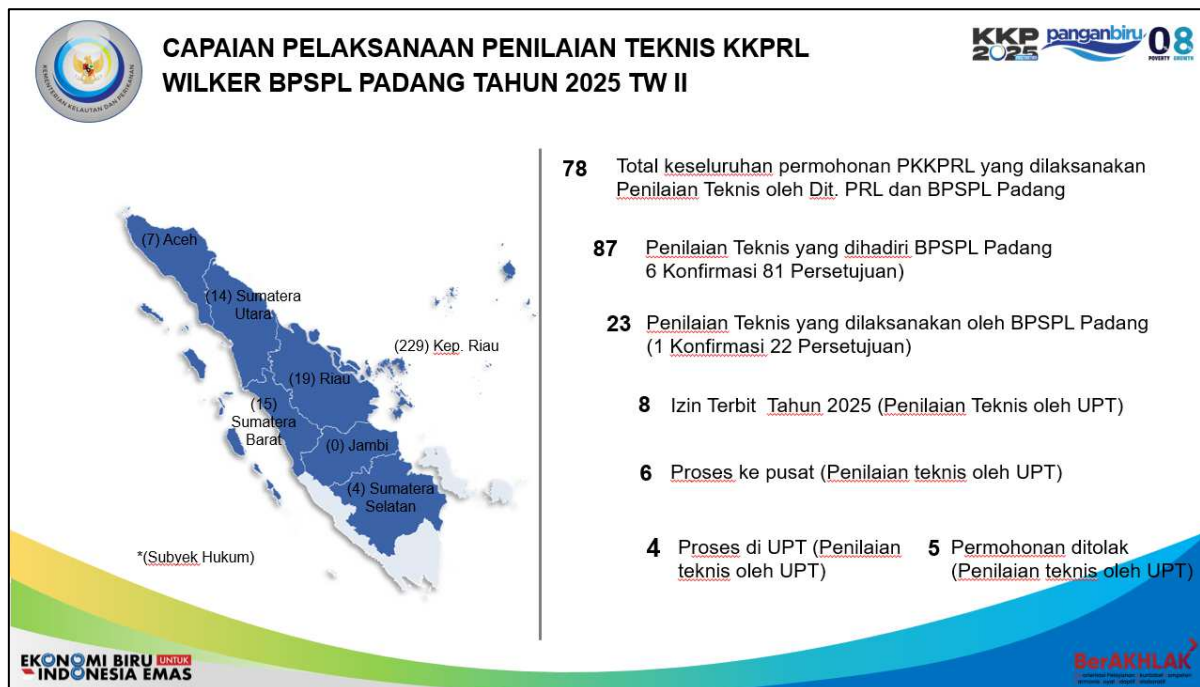
Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh kelengkapan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan kooperasi dari pelaku usaha pemanfaatan ruang laut. Sepanjang triwulan II 2025, BPSPL Padang telah melaksanakan penilaian teknis, penilaian lapangan dan asistensi dalam lingkup perizinan pemanfaatan ruang laut. Selain itu, anggaran pendukung kegiatan ini sudah tidak terblokir sehingga pelaksanaan kegiatan pendukung dapat berjalan kembali.

E. Kegiatan Pendukung

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh kegiatan berikut.

1. Penilaian Teknis Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

Penilaian teknis merupakan salah satu tahapan dalam pemrosesan izin KKPRL yang dimohonkan oleh pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (PRKPD) dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan BPSPL Padang berperan sebagai penyelenggara penilaian teknis. Rekapitulasi verifikasi teknis perizinan kesesuaian ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang selama periode triwulan II 2025 disajikan dalam ilustrasi di bawah ini.



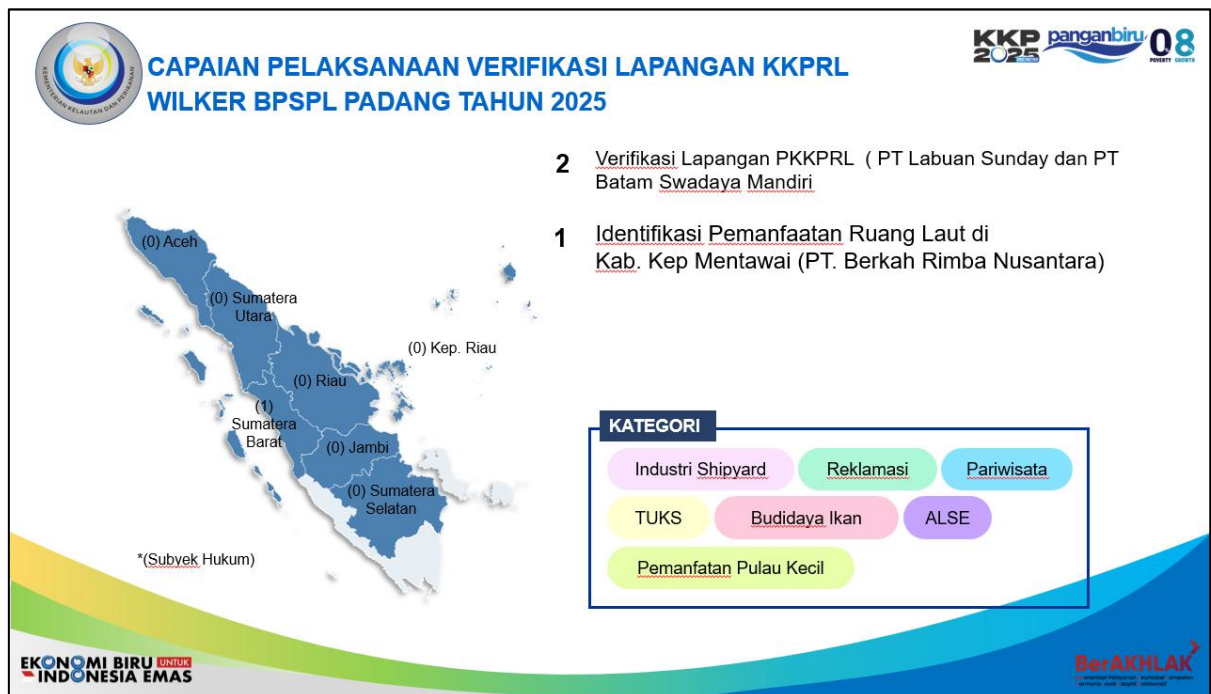
Gambar 26. Penilaian Teknis KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Triwulan II 2025

I	QUALITY CONTROL	NOMOR PERMOHONAN	NOMOR PENDAFTARAN	NOMOR PENILAIAN	SUBYEK HUKUM	NOMOR BERITA ACARA	NAMA PIMPINAN PENILAIAN TEKNIS	REKOM HASIL PENILAIAN TEKNIS	HASIL	STATUS
	Riza	I-202412031007202797954 I-202412030951465665976	24.11.B.00699	24.11.B.00699	YULANI	B.854/DJPKRL.2/PRL.140/II/2025	Rizki Walnur	Diterima/ Diterbitkan	Terbit	Selesai
	Riza	I-202501120944071506544	25.11.A.00061	25.12.10009	WINDA	B.855/DJPKRL.2/PRL.140/II/2025	Try	Dikembalikan/ Ditolak	Tolak	
12 Februari 2025	Riza	I-202501081031372859953	25.11.A.00037	25.12.10010	IMAN SYAHPUTRA	B.1205/DJPKRL.2/PRL.140/II/2025	Kris Handoko	Diterima/ Diterbitkan	Terbit	Selesai
	Riza	I-202412272051054208925	24.11.A.03663	25.12.10011	LILI	B.1206/DJPKRL.2/PRL.140/II/2025	Monika	Dikembalikan/ Ditolak	Tolak	Selesai
	Riza	I-202412272051054208925	24.11.A.03663	25.12.10011	PT LABUAN SUNDAY MANDEH	B.1207/DJPKRL.2/PRL.140/II/2025	Monika	Dikembalikan/ Ditolak	Tolak	verap dulu
26 Februari 2025	Riza	I-202505072055485972531	25.11.A.00174	25.12.10013	PT ALAM INDAH BINTAN	B.1656/DJPKRL.2/PRL.140/II/2025	Maikal K.	Diterima/ Diterbitkan	Terbit	Selesai
	Riza	I-202502071038584366720	25.11.A.00266	25.12.10014	HERU FARTA	B.1657/DJPKRL.2/PRL.140/II/2025	Rahmad Hidayat	Diterima/ Diterbitkan	Terbit	Selesai
	Riza	I-202411151138196080024	25.11.A.00263	25.12.10015	HENDRIK	B.1658/DJPKRL.2/PRL.140/II/2025	Rahmad Hidayat	Dikembalikan/ Ditolak	Tolak	Selesai
	Rhega	I-202401231332565143575	24.11.A.01991	25.12.10016	TJAGUS THAMRIN		Dina	Dikembalikan/ Ditolak	Tolak	Menunggu Perbaikan
16 Mei 2025	Rhega	I-202503131413034682846	25.11.A.00637	25.12.10017	PT SWADAYA MITRA PERKASA		Fauzi Fathan	Diterima/ Diterbitkan	Proses Pusat	Menunggu Perbaikan
	Rhega	I-202502281527040363029	25.11.A.00513	25.12.10018	PT SWADAYA MITRA PERKASA		Fauzi Fathan	Diterima/ Diterbitkan	Proses Pusat	Menunggu Perbaikan
	Rhega	I-202502061834501961870	25.11.A.00289	25.12.10019	PT SWADAYA MITRA PERKASA		Fauzi Fathan	Diterima/ Diterbitkan	Proses Pusat	Menunggu Perbaikan
	Rhega	24.11.B.00389	24.11.B.00389-AC	25.12.10020	DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIMELU		Dina	Diterima/ Diterbitkan	Proses Pusat	Menunggu Perbaikan
	Rhega	I-202503191351265001958	25.11.A.00691	25.12.10021	HENDRIK				Proses UPT	
	Rhega	I-202504081015323884982	25.11.A.00773	25.12.10022	LILI				Proses UPT	
	Rhega	I-202503121020366508678	25.11.A.00618	25.12.10023	PT MARINDO UTAMA LESTARI				Proses UPT	
	Rhega	I-202503061437100062939	25.11.A.00585	25.12.10024	FIRMAN				Proses UPT	

Gambar 27. Penilaian Teknis yang Dilaksanakan oleh BPSPL Padang Triwulan II 2025

2. Verifikasi Lapangan KKPRL

Verifikasi lapangan merupakan tahapan lanjutan dalam pemrosesan izin KKPRL setelah penilaian teknis ketika terdapat hal-hal yang perlu ditinjau kembali di lapangan. Berikut adalah rincian kegiatan verifikasi lapangan KKPRL yang BPSPL Padang laksanakan pada triwulan II 2025.



Gambar 28. Verifikasi Lapangan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Triwulan II 2025

3. Identifikasi KKPRL

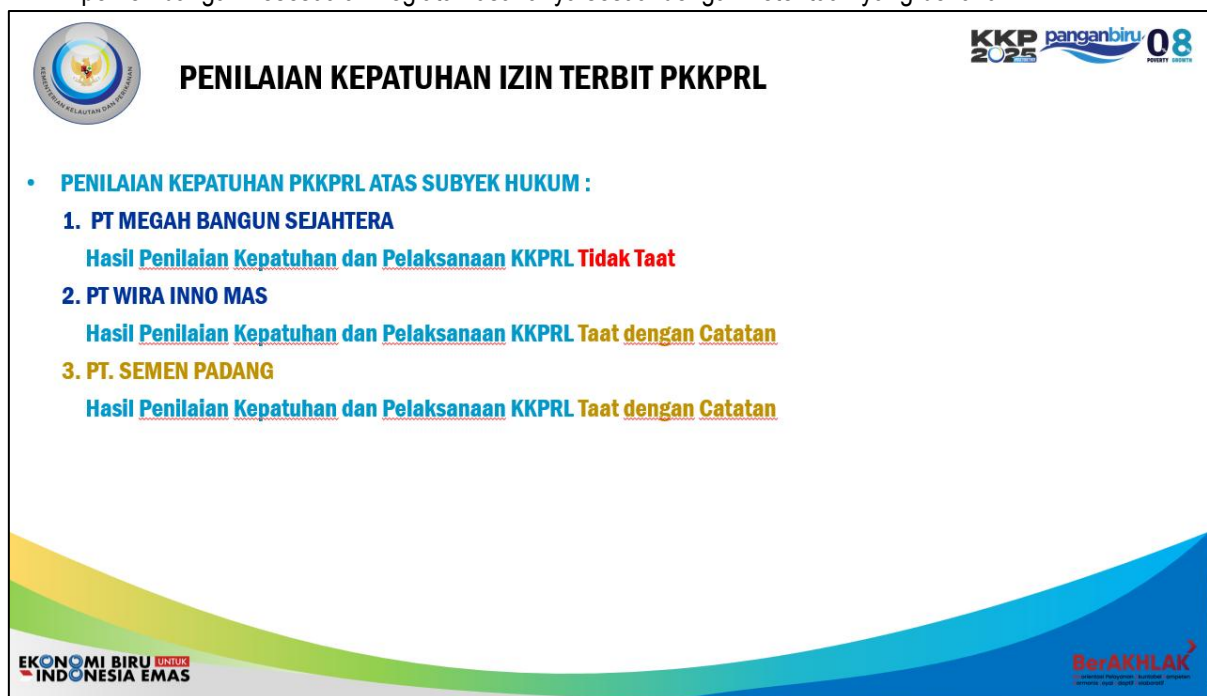
Identifikasi KKPRL dilaksanakan terhadap pelaku usaha pemanfaat ruang laut yang belum memiliki KKPRL. Rekapitulasi identifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang disajikan dalam ilustrasi di bawah ini.



Gambar 29. Identifikasi KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Triwulan II 2025

2. Pengendalian KKPRL

Pengendalian KKPRL dilaksanakan kepada pelaku usaha pemegang izin KKPRL untuk memantau perkembangan kesesuaian kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 30. Pengendalian KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Triwulan II 2025

IKM. 9. Nilai PM SAKIP BPSPL Padang (Nilai)

Nilai PM SAKIP BPSPL Padang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BPSPL Padang merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkup BPSPL Padang. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I atau Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Data capaian rilis melalui surat dari Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL.

Adapun kategori nilai PM SAKIP antara lain sebagai berikut:

1. predikat AA dengan nilai >90-100 dengan kategori Sangat Memuaskan;
2. predikat A dengan nilai >80-90 dengan kategori Memuaskan;
3. predikat BB dengan nilai >70-80 dengan kategori Sangat Baik;
4. predikat B dengan nilai >60-70 dengan kategori Baik;
5. predikat CC dengan nilai >50-60 dengan kategori Cukup;
6. predikat C dengan nilai >30-50 dengan kategori Kurang;
7. predikat D dengan nilai 0-30 dengan kategori Sangat Kurang.

A. Capaian Nilai PM SAKIP BPSPL Padang

Rincian target IKM 9 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 19. Perbandingan Target dan Capaian IKM 9

IKM 9. Nilai PM SAKIP BPSPL Padang (Nilai)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	70	-

Hingga berakhirnya triwulan II 2025, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Pada tahun 2024 dan 2025, IKU ini memiliki target tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian IKM ini dapat didukung oleh adanya harmonisasi antara tim pengelola kinerja, dari sub-tim perencanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan. Selain itu, pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

E. Kegiatan Pendukung

Upaya pencapaian IKM ini dapat ditunjang dengan adanya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup BPSPL Padang secara konsisten dari tahap perencanaan, pengukuran,

pelaporan, verifikasi, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, kepatuhan pelaporan dan pendokumentasian data dukung kinerja juga dapat mendukung perolehan nilai SAKIP.

IKM. 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA BPSPL Padang (Nilai)

Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Adapun indikator penilaian IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA, bobot 10%,
2. Deviasi RPD, bobot 15%,
3. Penyerapan Anggaran, bobot 20%,
4. Belanja Kontraktual, bobot 10%,
5. Penyelesaian Tagihan, bobot 10%,
6. Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%,
7. Dispensasi SPM, pengurang nilai IKPA,
8. Capaian output, bobot 25%,

A. Capaian Nilai IKPA BPSPL Padang

Rincian target IKM 10 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 20. Perbandingan Target dan Capaian IKM 10

IKM. 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA BPSPL Padang						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
99,27	85	98,08	115,39	-(1,19)	89	110,2

Capaian Nilai IKPA BPSPL Padang pada triwulan II 2025 adalah 98,08 dengan persentase capaian 115,39%.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RhsH84iheRjZCaUyugwqcUaXY0pt7VOG>

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA													
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Sampai Dengan : JUNI													
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total
1	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	89.10	100.00	100.00	100.00	97.18	100.00	98.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	13.37	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00	
					Nilai Aspek	94.55		99.30				100.00	
													100%
													0.00
													98.08

Tabel 21. Nilai IKPA Triwulan II 2025
(Sumber: Aplikasi OM SPAN, Juli 2025)

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Perbandingan antara capaian triwulan II 2024 dengan triwulan II 2025 adalah terdapat penurunan capaian sebesar 1,19%. Adapun penurunan tersebut terdapat pada komponen penilaian Deviasi Halaman III DIPA yang dipengaruhi besar oleh dinamika efisiensi dan blokir anggaran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Ditinjau dari perbandingannya dengan target tahunan, capaian Nilai IKPA triwulan II 2025 memiliki persentase capaian 110,2.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya pencapaian IKM ini didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Dalam hal ini, kedisiplinan, konsistensi, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam unsur-unsur pelaksanaan anggaran sangat penting dalam pencapaian nilai IKPA yang baik. Dalam pelaksanaan anggaran, acap kali ditemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pengelola keuangan dapat melakukan monitoring secara berkala, khususnya dalam hal menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Dengan adanya sistem monitoring tersebut, permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangan tindak lanjutnya.

E. Kegiatan Pendukung

Keberhasilan pencapaian IKM ini dapat ditunjang dengan metode pengawasan yang berjenjang. Dalam hal pelaksanaan anggaran, tim pengelola keuangan BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring yang berguna untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya sistem tersebut dapat mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusi yang dirumuskan.

IKM. 11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

A. Capaian NKPA BPSPL Padang

Rincian target IKM 11 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian IKM 11

IKM 11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	71,5	-

Pada periode triwulan II 2025, belum terdapat capaian terhadap IK ini. IK ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Pada tahun 2024 dan 2025, IKU ini memiliki target tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini juga didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan aspek penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Pada tahun 2024, penyajian data pada aplikasi SMART DJA telah terkoneksi dengan pengisian rincian output ke aplikasi SAKTI. Dalam hal ini, BPSPL Padang senantiasa melakukan koordinasi dengan pengelola aplikasi terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka kesesuaian penyajian rincian output.

E. Kegiatan Pendukung

Pencapaian IKM ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu:

- Verifikasi Pelaporan Online SMART DJA,
- Penginputan Capaian Output pada aplikasi SAKTI setiap bulannya,
- Penyesuaian Pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Penarikan Dana.

IKM. 12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Ditjen PKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025. Adapun capaian Indikator Kinerja ini diperoleh dari Menginventarisasi dan Menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

A. Capaian Laporan SPIP yang Disusun

Rincian target IKM 12 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12

IKM. 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang								
Realisasi			Tahun 2025					
Triwulan II 2022	Triwulan II 2023	Triwulan II 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
2	2	2	2	2	100	-	4	50

Capaian IKM 12 pada triwulan II 2025 telah sesuai target 2 dokumen dengan persentase capaian 100%, yaitu melalui penyusunan Laporan SPIP BPSPL Padang Triwulan IV 2024 dan Triwulan I 2024.

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n-scqZ9hfRvOhy_OnMxEc_LPHeDAUxoS

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Realisasi IKM 11 pada triwulan II 2024 dan triwulan II 2025 adalah sama, yaitu satu dokumen. Maka dari itu, tidak terdapat persentase kenaikan capaian IKM 11 pada triwulan II 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Capaian IKM 11 pada triwulan II 2024 telah mencapai 50% dari target tahunan, yaitu dengan tercapainya dua dokumen dari target tahunan empat dokumen.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung dengan adanya kegiatan pengendalian rutin, berkala, dan Manajemen Risiko dalam pengendalian intern di lingkup BPSPL Padang. Sementara itu, untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi, dilakukan FGD Manajemen Risiko. Pengendalian Risiko Kegiatan BPSPL Padang dibuat berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk diantisipasi dan dijadikan bahan masukan dalam persiapan kegiatan.

E. Kegiatan Pendukung

Pencapaian IKM ini didukung dengan implementasi pengendalian intern dan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan dengan menyertakan data dukung yang dilaporkan secara berkala. Lebih lanjut, BPSPL Padang juga menerapkan implementasi penguatan integritas dan pemantauan risiko secara berkala dan menyeluruh.

IKM. 13. Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Adapun bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- Kualifikasi, yang diukur dari indikator Riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, memiliki bobot 25%,
- Kompetensi, yang diukur dari indikator Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, memiliki bobot 40%,
- Kinerja, yang diukur dari indikator penilaian prestasi kerja, memiliki bobot 30%,
- Disiplin, yang diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin, memiliki bobot 5%.

Penjumlahan dari nilai masing-masing dimensi akan menghasilkan Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori penilaian sebagai berikut:

- 91-100: Sangat Profesional/Sangat Tinggi,
- 81-90: Cenderung Profesional/Tinggi,
- 71-80: Rentan Tidak Profesional/Sedang,

- d. 61-70: Cenderung Tidak Profesional/Rendah,
- e. ≤60: Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah.

A. Capaian IP ASN BPSPL Padang

Rincian target IKM 13 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 24. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13

IKM. 13. Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024 - TW I 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
90,92	78	88,51	113,47	-(2,65)	80	110,64

Capaian IP ASN BPSPL Padang triwulan II 2025 adalah 88,51 dengan persentase capaian 113,47%.

Tabel 25. Capaian IP ASN BPSPL Padang Triwulan II 2025

Komponen				Total
Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
21,58	34,65	27,28	5	88,51

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OIBLOLDPJzh55xQH7cldmCrA70wLxGr6>

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Perbandingan capaian IP ASN triwulan II 2024 dengan triwulan II 2025 adalah terdapat penurunan sebesar 2,65%. Adapun penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan pada komponen kompetensi dari 38,04 menjadi 34,65. Dalam hal ini, hingga triwulan II 2025 masih terdapat pegawai BPSPL Padang yang belum memenuhi pengembangan kompetensi 20 JP karena belum menginput sertifikat pengembangan dirinya ke laman SIASN.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, capaian triwulan II 2025 memiliki persentase capaian 110,64%. Nilai IP ASN BPSPL Padang masih memiliki potensi untuk meningkat setelah seluruh pegawai memenuhi sertifikat pengembangan kompetensi 20 JP.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung dengan adanya kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat diikuti pegawai. Setiap pegawai dapat memenuhi diklat 20 JP-nya melalui kegiatan pengembangan diri yang tersedia secara luring dan daring untuk mendorong perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang. Namun demikian, pencapaian IP ASN BPSPL Padang tidak meningkat secara signifikan karena tidak ada tambahan pegawai yang meningkat kualifikasi pendidikannya. Maka dari itu, alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IP ASN BPSPL Padang adalah mendorong pegawai yang telah selesai izin dan tugas belajar untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi akhirnya agar gelarnya dapat segera diakui.

E. Kegiatan Pendukung

Pencapaian IKM ini didukung oleh keaktifan pegawai dalam mengikuti pengembangan kompetensi workshop/diklat yang diinput ke dalam SIASN. Untuk itu, BPSPL Padang senantiasa melakukan monitor pencapaian IP ASN masing-masing pegawai. Monitoring tersebut dilakukan dengan pengunggahan bukti dukung nilai IP ASN masing-masing pegawai ke laman *google drive* untuk memudahkan pemantauan.

IKM. 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Padang. Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. Jika tidak ada ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100. Selain itu, 2. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

A. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja

Rincian target IKM 14 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 26. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14

IKM. 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024 - TW I 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
100	95	100	105,26	-	95	105,26

Capaian IKM 14 pada triwulan II 2025 adalah 100%. Capaian tersebut menghasilkan persentase capaian 105,26%.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kshpmG4zivubKocyelvihnRp0LDjtb2u>

Jumlah Laporan : 13 Dokumen

Jumlah Temuan : 43 Temuan

Jumlah Rekomendasi : 85

Nilai Keuangan : Rp17.272.168

Tuntas : 85 Rekomendasi

Proses : 0 Rekomendasi

Pending : 0 Rekomendasi

Sisa Nilai Keuangan : Rp0

Search:

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
3691	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.98/ITJ.1/HP.410/III/2025	2025-03-17	Evaluasi Pengelolaan BMN dan PNPB Tahun 2024 - 2025 pada Satker BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
3096	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	100/ITJ.1/HP.430/IV/2024	2024-05-28	Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	TUNTAS	Q Detail
2950	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Pemantauan	T.44/ITJ.3/HP.550/II/2024	2024-01-25	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2609	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.430/ITJ.3/HP.470/VIII/2023	2023-08-31	Laporan Hasil Evaluasi PNBSP TA 2022-2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2606	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.427/ITJ.3/HP.430/VIII/2023	2023-08-29	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2467	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.162/ITJ.3/HP.460/IV/2023	2023-04-14	Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2366	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Audit	T.82/ITJ.3/HP.110/II/2023	2023-02-21	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2143	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.239/ITJ.3/HP.430/IX/2022	2022-09-07	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
1875	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Audit	T.85/ITJ.3/HP.110/II/2022	2022-03-30	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2021 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
1517	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	4908/ITJHP.322/IV/2021	2021-04-19	Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Tracking Mangrove pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang di Provinsi Sumatera Barat	TUNTAS	Q Detail
1510	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Pemantauan	4905/ITJHP.550/IV/2021	2021-04-13	Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	TUNTAS	Q Detail
1497	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	5075/ITJHP.440/VI/2021	2021-07-19	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir (BPSPL) Padang Tahun 2021	TUNTAS	Q Detail
351	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Pemantauan	4143/ITJHP.550/VII/2019	2019-08-28	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBKM pada BPSPL Padang, Provinsi Sumatera Barat	TUNTAS	Q Detail

Gambar 31. Status Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terhadap BPSPL Padang
(Sumber: Aplikasi SIDAQ, Juli 2025)

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Realisasi IKM 14 pada triwulan II 2024 dan triwulan II 2025 adalah sama, yaitu 100%. Maka dari itu, tidak terdapat persentase kenaikan capaian IKM 14 pada triwulan II 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Capaian IKM ini pada triwulan II 2024 telah melampaui target tahunan dengan persentase capaian 105,26%. Capaian ini dapat dipertahankan jika BPSPL Padang dapat senantiasa menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi selama tahun 2025 ini dengan tuntas.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM ini didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Padang. Dalam tindak lanjutnya, tim BPSPL Padang dimudahkan dengan adanya aplikasi SIDAK <https://sidak.kkp.go.id/> yang dapat menampilkan data temuan beserta status tindak lanjutnya. Dalam hal ini, penanggung jawab temuan harus menindaklanjuti catatan dari Inspektorat Jenderal sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

E. Kegiatan Pendukung

Keberhasilan pencapaian IKM ini dapat ditunjang oleh adanya upaya pendampingan oleh APIP terhadap kegiatan di BPSPL Padang. Dengan adanya pendampingan tersebut, ke depannya BPSPL Padang dapat meminimalisir jumlah temuan pada kegiatan serupa.

IKM. 15. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Padang (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Padang yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Padang Tahun 2023. Capaian IKM ini dihitung dari persentase perbandingan jumlah temuan LHP yang diselesaikan dengan Jumlah temuan, sebagaimana rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Padang yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Padang}} \times 100\%$$

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

A. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK

Rincian target IKM 15 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 27. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15

IKM. 15. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Padang (%)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

Pada periode triwulan II 2025, capaian IKM ini belum diperoleh karena IKM ini dijadwalkan tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II 2024 – triwulan II 2025 karena IKU ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang dalam penggunaan anggaran oleh Kepala BPSPL Padang. Setiap pertanggungjawaban keuangan harus mencantumkan bukti otentik dan konfirmasi langsung kepada pengguna anggaran. Sebagai antisipasi, BPSPL Padang perlu senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya dengan disertai penerapan nilai-nilai akuntabilitas untuk meminimalisir temuan.

E. Kegiatan Pendukung

Keberhasilan pencapaian IKM 15 dapat ditunjang dengan adanya evaluasi kinerja dan anggaran yang dilaksanakan setiap triwulannya. Pada kesempatan tersebut, dibahas secara tuntas perkembangan isu yang terdapat di BPSPL Padang, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam hal ini, BPSPL Padang memperhatikan aspek kinerja dan referensi keuangan yang sesuai.

IKM. 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh Unit Kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM):

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit adalah 48;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel" minimal 19,50, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya" minimal 3,75;
4. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 15,75.

Adapun capaian IK ini diperoleh dari Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya

A. Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM

Rincian target IKM 16 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16

IKM. 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)						
Tahun	Triwulan II 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	85	-

Tidak terdapat realisasi capaian IKM 16 pada triwulan II 2025 karena indikator ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II 2024-2025 karena IKU ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sebagai upaya pencapaian nilai Unit Kerja menuju WBBM yang maksimal, BPSPL Padang melaksanakan monitoring pembangunan zona integritas secara berkala untuk memantau perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dokumen tersebut dapat disusun sesuai dengan kriteria Petunjuk Teknis.

E. Kegiatan Pendukung

Dalam upaya pencapaian IKM ini, BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring secara berkala. Pada kegiatan ini, Ketua Pembangunan Zona Integritas BPSPL Padang memimpin sesi pembahasan yang mencakup evaluasi mandiri, pengecekan dokumen secara menyeluruh, hingga monitoring dari tindak lanjutnya. Adanya kegiatan ini dapat mendukung kedisiplinan tim dalam membangun area pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

IKM. 17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Padang (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.

A. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

Rincian target IKM 17 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian IKM 17

IKM. 17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Padang (Nilai)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	80	-

Hingga triwulan II 2025 berakhir, belum terdapat realisasi capaian IKM 17 karena pencapaian IKM ini dijadwalkan dalam periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II 2024 – triwulan II 2025 karena IK ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh pengelolaan arsip yang memenuhi kriteria penilaian. Dalam hal ini, pengelolaan arsip yang selaras didukung oleh sumber daya manusia dan sarana yang menunjang pengelolaan arsip.

E. Kegiatan Pendukung

Pengelolaan arsip didukung dengan kecakapan dan keterampilan arsiparis dalam pengelolaan arsip. Selain itu, pemahaman pegawai BPSPL Padang dalam menggunakan fitur Korespondensi pada aplikasi *Portal Collaboration Office* dalam persuratan juga dapat mendukung pengelolaan arsip lingkup BPSPL Padang.

IKM. 18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Padang (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

A. Capaian Persentase RUP PBJ yang Diumumkan pada SIRUP

Rincian target IKM 18 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 30. Perbandingan Target dan Capaian IKM 18

IKM. 18 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Padang (%)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2023 - TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	76	100	131.58% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku	-	76	131.58% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku

Capaian IKM 18 pada triwulan II 2025 adalah 100%. Capaian tersebut menghasilkan persentase capaian 131,58% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku.

Dokumen pendukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VWMGXvijR8Ab11XV_qbydKATbkSN41sT

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Capaian IKU ini pada triwulan II memiliki persentase capaian 131,58% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku jika dibandingkan dengan target tahunan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung dengan pembaharuan pada aplikasi SIRUP secara berkala. Selain itu, pembaharuan yang dilakukan juga memperhatikan dinamika yang terjadi, seperti akun-akun anggaran yang terdampak blokir akibat efisiensi anggaran.

E. Kegiatan Pendukung

Pencapaian IKM ini didukung dengan pembaharuan pada aplikasi SIRUP secara berkala setiap adanya revisi RKA-K/L.

IKM. 19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

1. Mengumumkan informasi publik
2. Menyediakan informasi publik
3. Sarana dan Prasarana
4. Kelembagaan
5. Digitalisasi

A. Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Rincian target IKM 19 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 31. Perbandingan Target dan Capaian IKM 19

IKM. 19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 – TW II 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	-	91	-

Hingga triwulan II 2025 berakhir, belum terdapat realisasi capaian IKM 19 karena pencapaian IKM ini dijadwalkan dalam periode tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2025

IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2025 dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

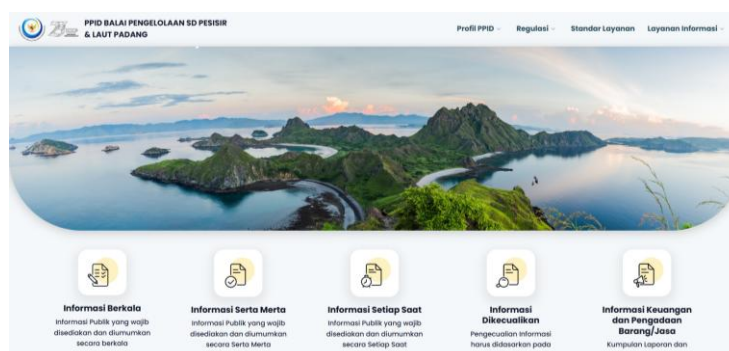
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh pengelolaan *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan media sosial BPSPL Padang dalam menyampaikan informasi publik sesuai dengan aspek penilaian yang ditetapkan.

E. Kegiatan Pendukung

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian IKM ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan konten publikasi yang wajib disampaikan melalui website PPID dan media sosial,
2. Pengelolaan website PPID, dan
3. Pengelolaan media sosial.



Gambar 32. Tampilan Website PPID BPSPL Padang

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025 ini BPSPL Padang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 032.07.2.499346/2025 sebesar **Rp17.679.108.000,00** (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 73,84% bersumber dari Rupiah Murni sementara 26,16% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga triwulan II 2025, terdapat **blokir terhadap anggaran tersebut sejumlah Rp 2.943.924.000** (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Blokir tersebut merupakan blokir efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Kode Blokir A).

Pada triwulan II 2025, realisasi anggaran mencapai **Rp6.439.681.665** (Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan **persentase 36,43%**. Adapun realisasi anggaran BPSPL Padang secara rinci disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Realisasi Anggaran BPSPL Padang Hingga Triwulan II 2025

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang		17.679.108.000,00	2.943.924.000,00	6.439.681.665,00	36,43
2362 Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan					
2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	155.000.000,00	155.000.000,00	-	-
2362.PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	2.010.000.000,00	1.274.209.000,00	-	-
2362.PEE.001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	70.000.000,00	56.230.000,00	-	-
2362.QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	815.000.000,00	709.640.000,00	-	-
2362.REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appeniks CITES	250.000.000,00	71.900.000,00	-	-
2362.SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
2365 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
2365.PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar	350.000.000,00	127.000.000,00	-	-
2366 Penataan Ruang Laut					
2366.PBT.009	Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Berisiko Rendah	875.000.000,00	339.520.000,00	-	-
2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
2367.EBA.956	Layanan BMN	56.120.000,00	-	9.824.196,00	17,50
2367.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	18.020.000,00	-	-	-
2367.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	122.948.000,00	-	35.445.241,00	28,83

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2367.EBA.962	Layanan Umum	29.780.000,00	14.890.000,00	760.000,00	2,55
2367.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.519.000.000,00	37.905.000,00	6.366.703.381,00	50,86
2367.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	82.660.000,00	27.880.000,00	-	-
2367.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	93.270.000,00	6.240.000,00	-	-
2367.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	72.170.000,00	-	19.397.377,00	26,88
2367.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	60.140.000,00	-	7.551.470,00	12,56

IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengukuran kinerja hingga periode Triwulan II 2025, terdapat 18 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPSPL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan yang juga disampaikan perkembangan kegiatannya. Adapun hasil pengukuran kinerja menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://kinerjaku.kkp.go.id/> menunjukkan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang pada triwulan II 2025 adalah 111,61 (kategori istimewa).**

Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPSPL Padang pada triwulan II 2025:

1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 3 Provinsi belum diukur capaiannya karena memiliki periode pengukuran tahunan.
2. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 25 Orang belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
3. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 1 Kesepakatan belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 5 Jenis belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 5 Jenis belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
6. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan dengan target tahunan 80 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
7. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 1 Dokumen belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
8. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 2 Dokumen belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
9. Nilai PM SAKIP BPSPL Padang dengan target tahunan 88 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang dengan target triwulan II 85 telah tercapai 98,08 dengan persentase capaian 115,39%.
11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang dengan target tahunan 71,5 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 4 Dokumen telah tercapai sesuai target 2 Dokumen pada Triwulan II 2025.
13. Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang dengan target triwulan II 78 telah tercapai 88,51 dengan persentase capaian 113,47%.
14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang dengan target 95% telah mencapai 100% pada triwulan II 2025.
15. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 100 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang dengan target tahunan 85 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.

17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Padang dengan target tahunan 80 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang dengan target 6% telah tercapai 100% pada triwulan II 2025.
19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang dengan target tahunan 91 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja yang dijadwalkan pada triwulan II 2025 dengan persentase $\geq 100\%$. Pencapaian tersebut juga didukung dengan adanya alokasi **pagu anggaran sejumlah Rp17.679.108.000,00** (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 73,84% bersumber dari Rupiah Murni sementara 26,16% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga triwulan II 2025, terdapat blokir terhadap anggaran tersebut sejumlah Rp 2.943.924.000 (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Blokir tersebut merupakan blokir efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Kode Blokir A). Pada triwulan II 2025, **realisasi anggaran mencapai Rp6.439.681.665** (Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) **dengan persentase 36,43%**. Adapun efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target tersebut belum menunjukkan nilai akhir karena periode pengukurannya yang berlangsung tahunan.

4.2. Rekomendasi

Dalam perkembangannya, tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target triwulan II 2025. Namun demikian, dalam upaya pencapaian kinerja periode selanjutnya, terdapat rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang anggaran pendukungnya sudah tidak terdampak blokir.

4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi

Berikut disajikan rekapitulasi rekomendasi beserta tindak lanjutnya.

Periode Pelaporan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan I 2025	Pemantauan kinerja anggaran	BPSPL Padang telah melaksanakan pemantauan kinerja anggaran secara berkala (dua minggu hingga 1 bulan sekali) dengan cara pemantauan realisasi, perbandingan dengan RPD, serta dan catatan-catatan yang perlu ditindaklanjuti.	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sB5iY03N43VRzy1jOcg-cRIMthCqtcS8
	Melengkapi pengembangan kompetensi 20 JP	BPSPL Padang telah mensosialisasikan pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP kepada seluruh pegawai.	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Uh2Nph9KDnf9YZAVH84M17vhPTZpiWbZ

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sesprdirjenpri@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 **BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)** **PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fajar Kurniawan**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang

Fajar Kurniawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	1.	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang (Provinsi)	3
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	2.	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	25
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Padang	3.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
4.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	4.	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
5.	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang	5.	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
6.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	2
7.	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	7.	Dokumen identifikasi pemanfaatan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1

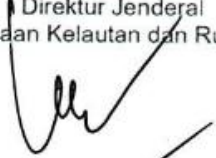
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
8.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Padang	8.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	88
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	92
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)	71,5
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		12.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)	87
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	95
		14.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		15.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)	85
		16.	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang (Nilai)	80
		17.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	76
		18.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	91

Data Anggaran

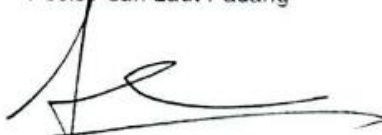
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	875.000.000
2.	Konservasi Ekosistem Biota dan Perairan	3.400.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	350.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.054.108.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2025		17.679.108.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang


Fajar Kurniawan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendrisman**

Jabatan : **Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : **Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hendrisman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	2

3

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan Ruang Laut	875.000.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2025		875.000.000

Keterangan: Blokir anggaran sebesar Rp339.520.000 sehingga Pagu Efektif BPSPL Padang Tahun 2025 sebesar Rp535.480.000.

Jakarta, Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hendrisman

Lampiran 2. Penghargaan BPSPL Padang





